

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abhan et al. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 perihal Para penyelenggara Pemilu*. Cetakan Ke-1 (Jakarta: Bawaslu, 2019).
- Afrimadona et al. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara*. Cetakan Ke-1 (Jakarta: BAWASLU, 2019).
- Assihdiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*. Cetakan ke-2. (Jakarta, Konstitusi Press, 2005).
- Atmadja, Dewa et al. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. (Malang: Setara Press, 2015).
- Bawaslu, *Indeks Kerawanan Pilkada Tahun 2020*, (Jakarta: Bawaslu, 2020).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cetakan ke-9. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Buyung Nasution, Adnan dan A. Putra M. Zen. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).
- C, Anwar. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Cetakan ke-3. (Malang: Setara Press, 2015).
- Cholisin et al. *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007).
- Fadli Ramadhanil et al. *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu*. (Jakarta: Perludem, 2019).
- McLeod, Ian. 1999. *Legal Theory*. London: Palgrave Macmillan Ltd.
- Murtopo, Ali. *Strategi Pembangunan Nasional*, CSIS, 1981, hlm. 179-190, lihat Bintang R. Saragih. *Lembaga-lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988)
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-3. (Jakarta: UI Press, 1986).
- Syarbaini, Syahril et al., *Sosiologi dan Politik*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- _____ dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2003).
- T, Triwulan, Titik. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).

B. Peraturan perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109*).
Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678*).
Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICPPR. (*Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*) (*Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4558*).
Komisi Pemilihan Umum RI. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Gubernur, Bupati dan Wakili, dan/atau Walikota.

C. Putusan Peradilan

MKRI. *Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 Tentang pengujian UU Nomor 12 Tahun 2003*. (Jakarta: MKRI, 2003)
MKRI. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2009).
MKRI. *Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017*. (Jakarta: MKRI, 2019).

D. Artikel jurnal dan Skripsi

Agus Maulidi, Moh. “Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*. Vol. 24 No. 4 Tahun 2017.

A. Legowo, Tommi. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Good Governance dan Masa Depan Otonomi Daerah. *Jurnal Desentralisasi*. Vol. 6 No. 4 Tahun 2005

B. S Nugroho, Fadzlun. “Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal hukum*. Volume 2 No. 2 Tahun 2019.

Dosdy A. Saragih, Andre. Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. *Lex et Societatis*. Edisi No. 3 Tahun 2017.

- Estu Bagijo, Himawan. "Daftar Pemilih Tetap Dan Perlindungan Hak Pilih (Kajian Perundang-undangan dan Keputusan MK)". *Jurnal Prespektif*. Edisi No. 4 Tahun 2010.
- Laksono, Fajar et al. "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/ Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10 No. 4 Tahun 2013.
- Patricia, Felicia dan Chindy Yapin. "Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan umum". *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol. 8 No. 2 Tahun 2019.
- Pigome, Martha. "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11 Nomor 2 Tahun 2011.
- R. K, Rizqi Ahmad dan Rasji. Kekuatan Mengikat putusan Ajudikasi Bawaslu Dalam sengketa Proses Pemilu 2019. *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 1 No. 2 Tahun 2018.
- Sulaeman, Affan. "Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2015.
- Yuri Rahmant, Tony. "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM*. Vol. 6 No. 1 Tahun 2019.

E. Internet

- Anonim. "Bab II Kajian Teori A. Hak pilih sebagai Hak Asasi". <http://eprints.uny.ac.id/23563/4/4.%20BAB%20II.pdf>. diunduh pada 14 Mei 2020 pukul 16.24 WIB.
- Bobero, Faris (ed). 7577 Warga di Halmahera Utara Malut, Belum Miliki E-KTP, <https://kumparan.com/ceritamalukuutara/7-557-warga-di-halmahera-utara-malut-belum-miliki-e-ktp-1t3UkpDW5JG/full>, diakses tanggal 25 Mei 2020.
- Fachrudin, Achamd. Dampak Putusan MK Nomor 20 Tahun 2019. <https://news.detik.com/kolom/d-4501189/dampak-putusan-mk-nomor-20-tahun-2019> diakses tanggal 26 Mei 2020.
- Ratnaningsih, Erna. Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2020.
- Rizki Amelia, Vini. Data KTP elektronik Belum Tercetak Seratusan Ribu Warga Terancam Nyoblos di Pilkada Kota Depok. <https://wartakota.tribunnews.com/2020/03/13/data-ktp-elektronik->

[belum-terekam-seratusan-ribu-warga-terancam-tak-nyoblos-di-pilkada-kota-depok](#)

Salabi, Amalia. “Evaluasi Hak Memilih di Pemilu 2019 Kondisi Khusus Perlu Tindakan Khusus”. Artikel Liputan Khusus. <https://rumahpemilu.org/evaluasi-hak-memilih-di-pemilu-2019-kondisi-khusus-perlu-tindakan-khusus/>. Diakses tanggal 24 Mei 2020.

Tuhakdt. Bab II Tinjauan Umum Hak Pilih Terkait Hak Asasi Manusia. <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/0790561061-3-TEISIS%20Final%20Bab%20II.pdf>, diunduh pada tanggal 14 Mei 2020 pukul 18.00 WIB.

Usmin. 1052 Warga Lebong Bengkulu Belum Memiliki E-KTP, <https://www.beritasatu.com/nasional/603763-1052-warga-lebong-bengkulu-belum-memiliki-ektp>, diakses tanggal 24 Mei 2020.